

# PERAN TARUNA SIAGA BENCANA DALAM MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN SERANG DAN SUKABUMI

## *THE ROLE OF YOUTH MITIGATE SQUAD IN DISASTER MITIGATION IN SERANG AND SUKABUMI*

**Aulia Rahman**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI  
Jalan Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur, Telp (021) 8017146, Fax (021) 8017126  
**E-mail:** aulia.rahman@kemsos.go.id

Diterima: 30 Agustus 2016; Drevisi: 1 Nopember 2016; Disetujui: 14 Desember 2016

### **Abstrak**

Penelitian mengenai peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) pada mitigasi bencana belum banyak dilakukan. Pada umumnya mengkaji peran Tagana pada tahap kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran Tagana dalam mitigasi bencana di Kabupaten Serang dan Sukabumi, bagaimana koordinasi antara Tagana dan pemerintah daerah pada kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Serang dan Sukabumi dan manfaat partisipasi Tagana dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Serang dan Sukabumi. Metode wawancara dilakukan terhadap 9 narasumber yang terdiri dari Kementerian Sosial sebagai lembaga pembina pusat, Dinas Sosial, (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Anggota Tagana Kabupaten dan masyarakat. Studi dokumentasi dilakukan dengan melihat artikel, laporan kegiatan dan dokumentasi terkait mitigasi yang sudah dilakukan. Temuan lapangan memberikan kesimpulan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten secara kesinambungan bekerjasama dengan Tagana untuk kegiatan mitigasi bencana dan koordinasi yang dilakukan antar lintas instansi sering dilakukan pada tiga tahapan penanggulangan bencana serta dapat disimpulkan masyarakat memahami tentang kegiatan mitigasi bencana serta turut serta pada setiap kegiatan mitigasi sehingga masyarakat siap jika menghadapi bencana.

**Kata Kunci:** tagana; mitigasi, bencana.

### **Abstract**

*Study of Tagana in disaster mitigation are mostly examines about Tagana role in preparedness and disaster response. This study examines the role of Tagana in disaster mitigation in Serang regency and Sukabumi regency, in terms of their coordinative activities and their participate on regional resilience. Data has collected through Interview Method that covers 9 informants consisted of Ministry of Social Affairs, District Social Services, Regional Disaster Management Agency (BPBD), a Tagana district member and the community. The source of secondary data are from articles, reports of activities and documentation related to the mitigation. The research found that the local government through the District Social Services and BPBD have cooperated with Tagana for disaster mitigation activities. The coordination among those agencies was conducted in three phases of disaster management. Beyond that, the research found that the people have also contributed in any mitigation activities.*

**Keywords:** tagana; mitigation; disaster.

## PENDAHULUAN

Paska bencana tsunami Aceh dan Nias, semakin menegaskan bahwa pengurangan risiko dampak bencana tidak hanya dilakukan dengan program yang bersifat struktural namun juga harus disertai dengan program yang mendorong adanya inisiasi fungsional dari elemen masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengakomodir rencana itu.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, telah ditetapkan program dan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana melalui pendayagunaan rencana tata ruang wilayah sebagai salah satu instrumen utama untuk mengurangi resiko bencana dan peningkatan kualitas informasi, data maupun peta wilayah rawan bencana yang memadai bagi analisa pola pemanfaatan ruang sekaligus menguatkan kelembagaan di tingkat daerah dalam pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang wilayah. Meskipun demikian, pencapaian di bidang penataan ruang wilayah pada tahun 2008 masih terkendala oleh beberapa hal pokok, diantaranya: (1) belum memadainya kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang wilayah di tingkat pusat dan daerah; (2) lemahnya dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang wilayah sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang tanggap terhadap bencana; (3) belum tersedianya Norma Standar Prosedur dan Manual (NSPM) penataan ruang wilayah yang tanggap terhadap risiko bencana; serta (4) belum optimalnya upaya penyediaan data dan informasi spasial (Presiden RI:2008).

Sementara itu, untuk mengurangi risiko bencana, pemerintah dalam RKP Tahun 2009 dengan mengintegrasikan beberapa kebijakan, antara lain: (Presiden RI:2008)

1. Penjabaran rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim global, kegiatan meliputi beberapa diantaranya: a) Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah dan implementasinya harus dilaksanakan oleh suatu institusi yang kuat dan bersifat koordinatif lintas sektoral; b) Mempersiapkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagai salah satu prioritas daerah dengan mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim global, serta dengan mengikutsertakan partisipasi dan konsensus serta komitmen berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah; c) Mengkaji termasuk mengembangkan Sistem Informasi Pengurangan Risiko Bencana serta peta multi rawan bencana yang terintegrasi antar institusi yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana; d) Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta mengembangkan sistem (prosedur dan teknologi) peringatan dini (*early warning system*); e) Mengurangi cakupan luasan dan dampak risiko bencana.
2. Pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim global, kegiatan meliputi beberapa diantaranya: a) Penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan bencana di tingkat nasional dan daerah-daerah, dengan prioritas pada daerah-daerah yang rawan bencana; b) Pembentukan Forum Nasional (*National Platform*) Penanggulangan Bencana sebagai pelaksanaan kesepakatan internasional dalam Kerangka Aksi Hyogo; c) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana; d) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk mampu memberikan tanggapan yang tepat dan efektif terhadap dampak bencana;

e) Penerapan sistem deteksi dini (*early warning system*) dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan dan dalam menghadapi bencana di tingkat daerah dan masyarakat; f) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM terkait dengan penyedia data dan informasi cuaca dan iklim dalam memprediksi iklim secara akurat dan menyebarkannya ke masyarakat secara langsung (*real time*);

3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim global, kegiatan meliputi beberapa diantaranya: a) Memanfaatkan pendidikan dan menciptakan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun budaya dalam mengurangi risiko bencana, keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan; b) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim global dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta tokoh masyarakat dan tokoh agama; c) Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam usaha pelaksanaan pengurangan risiko bencana; d) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan perubahan iklim global yang perlu diterapkan kedalam kegiatan mata pencaharian sehari-hari, seperti pertanian, perikanan dan lain-lain;
4. Pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana kegiatan meliputi beberapa diantaranya: a) Konsolidasi dan penyediaan informasi dan data spasial rawan bencana; b) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota berbasis pengurangan risiko bencana; c) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan faktor mitigasi bencana; d) Penguatan dukungan

Sistem Informasi dan Monitoring Penataan Ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang; e) Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan daerah dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang; f) Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan.

Pemetaan daerah rawan bencana, pembangunan sistem deteksi dini, dan pemanfaatan penataan ruang nasional merupakan langkah-langkah struktural dalam mitigasi bencana. Namun, ketiga kegiatan itu wajib memberikan ruang pada masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam penyampaian informasi terkait daerah bencana dan juga sebagai penerima informasi terkait bencana dan cara untuk menghindari dampak dari bencana. Poin ketiga dari empat kebijakan di atas menunjukkan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam usaha pengurangan risiko bencana. Banyak usaha untuk mengajak masyarakat untuk berperan dalam usaha ini, salah satunya dengan membentuk Tagana.

Penelitian mengenai peran masyarakat dalam hal ini Tagana pada penanggulangan bencana, belum banyak dilakukan dan sebagian besar meneliti mengenai peran Tagana dalam proses kesiapsiagaan. Pada Siklus penanggulangan bencana, kesiapsiagaan dilakukan setelah dilakukan tahapan mitigasi. Gunawan et. al. (2009) menyimpulkan bahwa secara organisatoris, yang dilakukan Tagana belum menjangkau kegiatan kesiapsiagaan serta komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan Tagana baru sebatas kebijakan pembentukan Tagana. Sementara itu, Enditya (2013) menemukan kurangnya urgensi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam kesiapsiagaan, kurangnya dana dan sumber

daya manusia, sistem manajemen informasi yang kurang efektif dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah yang kurang berjalan. Penelitian Sari (2014) mengungkapkan bahwa peran Tagana masih terfokus pada kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana. Idealnya kegiatan penanggulangan bencana lebih diarahkan pada kegiatan pencegahan/prabencana. Belum ditemukan penelitian secara khusus mengenai peran Tagana dalam siklus penanggulangan bencana khususnya pada tahapan mitigasi. Belum ada secara khusus penelitian yang meneliti tentang peran Tagana dalam tahapan mitigasi bencana.

Sementara itu, penelitian Fernandez dan Shaw (2013) yang berjudul “Youth Council Participation in Disaster Risk Reduction in Infanta and Makati, Philippines: A Policy Review” di Infanta dan Makati, Pulau Luzon Filipina. Istilah youth council hampir sama dengan Tagana di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Orang-orang muda di Filipina tidak diberi peran aktif dalam pengurangan terhadap risiko bencana; 2) Perlu melibatkan orang-orang muda dalam membantu membangun masyarakat yang tahan bencana melalui kebijakan pemerintah yang secara tegas mampu mendorong pemuda untuk aktif dalam usaha pengurangan resiko bencana. Pemuda di Filipina merupakan seperlima dari populasi dan merupakan potensi yang signifikan untuk berkontribusi dalam usaha pengurangan resiko bencana; 3) Program baru “Pemuda Pembangunan Filipina”, kebijakan eksplisit yang mendorong partisipasi pemuda dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB), kita bisa berharap inisiatif PRB lebih melibatkan anak muda di Filipina waktu dekat, terutama melalui dewan pemuda di masing-masing yang barangay (desa/daerah) di negara ini.

Melalui fenomena yang dijabarkan di atas dan melalui pengamatan serta data yang

dikumpulkan, dapat beberapa permasalahan, antara lain 1) Koordinasi yang kurang terjalin baik antara pelaksana penanggulangan bencana dengan masyarakat dan dengan pelaksana penanggulangan bencana lainnya; 2) Dukungan yang belum maksimal dari pemerintah daerah dan unsur masyarakat lain dalam peningkatan kapabilitas, fasilitas dan jumlah personil Tagana.

Rumusan masalah dari penelitian ini, yakni bahwa Peran Tagana dalam kegiatan mitigasi belum maksimal. Melalui rumusan permasalahan yang telah disimpulkan, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian, antara lain: 1) Bagaimana peran Tagana dan Pemerintah Daerah dalam mitigasi bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi? 2) Bagaimana koordinasi Tagana dengan pemerintah daerah terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi? 3) Manfaat partisipasi Tagana dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi? Tujuan penelitian ini, antara lain: 1) Mengetahui peran Tagana dalam mitigasi bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi; 2) Mendeskripsikan Koordinasi yang dilakukan Tagana dengan pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi; 3) Menjelaskan manfaat partisipasi Tagana dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan penanggulangan bencana alam tidak hanya menjadi tanggung jawab suatu bangsa atau negara tertentu tetapi merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia karena penanggulangan bencana alam merupakan bagian dari tanggung jawab kemanusiaan atau kehumanitarian sehingga hal ini mendorong beberapa negara untuk melakukan gerakan untuk bersama-sama proaktif terhadap

penanggulangan bencana melalui Deklarasi Hyogo atau dikenal juga dengan kerangka kerja Hyogo (*Hyogo Framework for Action/ HFA 2005-2015*). Berikut ini adalah 5 prioritas aksi utama aksi Hyogo (APEC:2009), 1) Make Disaster Risk Reduction as Priority; 2) Know The Risk and Take Action; 3) Build Understanding and Awareness; 4) Reduce Risk; 5) Be Prepared and Ready to Act. Kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Sendai yang menghasilkan kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana (2015-2030) dengan 4 prioritas aksi (BNPB:2015), antara lain: 1) Memahami risiko bencana; 2) Penguatan tata kelola risiko; 3) Investasi PRB untuk Resiliensi; 4) Meningkatkan manajemen risiko.

Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional mengenai penanggulangan bencana, dimulai dengan membuat payung hukum dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini menyebutkan bahwa komponen pelaksana penanggulangan bencana memiliki 3 (tiga) tahapan tugas yang secara terintegrasi meliputi, yaitu: a) prabencana, b) tanggap darurat, c) pasca bencana. Pasal 26 ayat 1e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bab V Hak dan Kewajiban Masyarakat, khususnya Pasal 26 bagian d, e, dan f, yakni: (d) berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; (e) berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan (f) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Sedangkan pada bagian “kewajiban masyarakat” yakni Pasal 27 Undang-Undang Penanggulangan Bencana: Setiap orang berkewajiban: (b). melakukan kegiatan penanggulangan bencana dan (c). memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana dan berkonsultasi dengan masyarakat setempat. Perlu tetap diimbangi juga dengan jaminan hukum pada pasal 26 (bagian c) yakni bahwa mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Di sini bisa diperluas juga tentang peran pemerintah dalam memberikan data dan informasi tentang bencana itu sendiri secara proaktif (Jonatan Lassa et.al.: 2009).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat merupakan faktor penting dalam penanggulangan bencana alam. Departemen Sosial melalui Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial berupaya meningkatkan peran masyarakat ini dengan membentuk Taruna Siaga Bencana (Tagana). Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI (Permensos RI) No. 29 Tahun 2012 tentang Tagana, menyebutkan bahwa Tagana adalah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Tagana dibentuk pada tanggal 23 Maret 2004. Adapun fungsi Tagana menurut Departemen Sosial (2006), terdiri dari: a) Fungsi Pencegahan, yaitu menghambat dan atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah atau kebutuhan yang dialami oleh korban dan lingkungan sosialnya; b) Fungsi Pengembangan atau



pemberdayaan, yaitu menumbuhkembangkan kemampuan, motivasi, serta peranan korban dan lingkungan sosialnya; c) Fungsi Rehabilitasi, yaitu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan serta memulihkan dan meningkatkan status dan peran sosial korban dan lingkungan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat; d) Fungsi Perlindungan, yaitu menjamin setiap warga negara agar terhindar dari aneka peristiwa bencana yang menyebabkannya, mengalami berbagai permasalahan; e) Fungsi Penunjang, yaitu mendukung keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan bencana sektor/bidang terkait lainnya.

Pada Pasal 7 Permensos RI No. 29 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pada fase prabencana, Tagana memiliki fungsi, antara lain: a) Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana; b) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana; c) Pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana; d) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana; e) Fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana; f) Pendeteksian dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana; g) Evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; h) Pengurangan risiko dan kesiapsiagaan lainnya.

Carter (2008) mendefinisikan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat, pemulihan dan pembangunan kembali. Selanjutnya, Carter menyebutkan bahwa tujuan dari manajemen bencana di antaranya, yaitu mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh

perorangan, masyarakat negara, mengurangi penderitaan korban bencana, mempercepat pemulihan, dan memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Pearce (Djalante et al., 2011) mengemukakan bahwa perencanaan dan pengelolaan bahaya bencana yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana. Pada sistem manajemen penanggulangan bencana, masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dengan komponen bangsa lainnya. Oleh karena itu, masyarakat harus punya andil dalam proses ini. Salah satu upaya pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses penanggulangan bencana yakni dengan membentuk Taruna Siaga Bencana (Tagana) sehingga Tagana menjadi manifestasi dari partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan bencana.

Carter (2008) mendefinisikan mitigasi sebagai tindakan yang bertujuan mengurangi dampak dari bencana alam atau bencana buatan manusia pada suatu bangsa atau masyarakat. Dengan definisi ini, asumsi dasarnya adalah bahwa kegiatan mitigasi itu sementara mencegah beberapa efek bencana, sedangkan efek lain jelas akan bertahan atau terjadi. Kemudian, Carter (2008) membagi ke dalam dua metode, yakni mitigasi fisik dan mitigasi nonfisik. Mitigasi fisik (*Structure Mitigation*) merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan meminimalisir risiko bencana dan dampaknya melalui pembangunan infrastruktur. Mitigasi nonfisik (*Non Structure Mitigation*) merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya dengan cara meningkatkan kemampuan baik fisik maupun teknik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

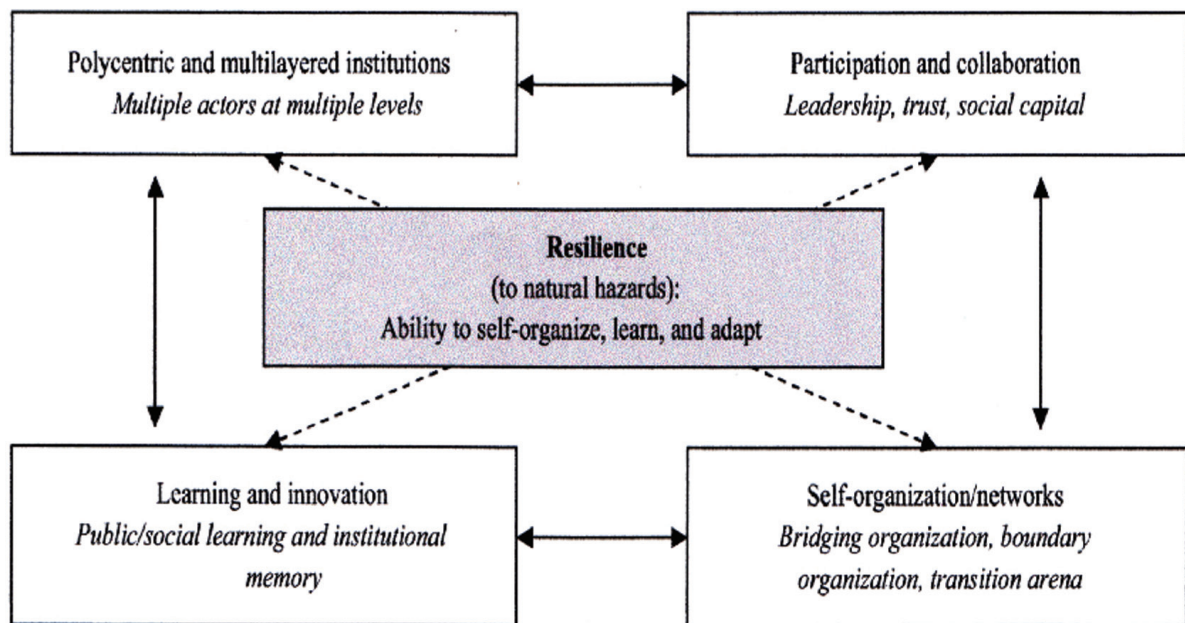
Keterlibatan pihak swasta/LSM dalam penanggulangan bencana, menurut Carter (2008), sebagai sumber non-pemerintah dapat dengan mudah dikoordinasikan ke dalam sistem. Hal ini dapat dilakukan, misalnya melalui dewan bencana nasional, melalui kantor manajemen bencana nasional (dengan adanya link penghubung LSM). dan melalui kelompok pengontrol operasi dan tim penasehat teknis (pada keduanya bisa ada perwakilan LSM). Selanjutnya keterlibatan masyarakat, Carter (1991) menjelaskan bahwa komunitas masyarakat tertentu dapat mempengaruhi beberapa komunitas di satu waktu yang sama dan komunitas ini disebut “*disaster front*”. Oleh karena itu, setiap organisasi penanggulangan bencana harus memenuhi partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang sesuai. “*Disaster front*” dapat dijelaskan sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pada tingkat masyarakatlah yang paling terdepan pada sistem manajemen bencana karena masyarakat yang paling mengetahui karakter tempat tinggal dan keadaan sosial yang ada. Hal ini penting dalam manajemen bencana terutama pada level mitigasi.

Rangkaian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen penanggulangan bencana membutuhkan partisipasi dan adanya kolaborasi dari berbagai organ yang termasuk dalam sistem penanggulangan bencana. Kolaborasi menurut Parker dan Braithwaite (Djalante et al., 2011) dapat didefinisikan sebagai proses di mana sekelompok *stakeholder* yang beragam, termasuk aktor pemerintah dan non pemerintah, individu dan masyarakat memberikan

pengetahuan dan sumber daya mereka secara nyata untuk memecahkan secara bersama tentang dilema sumber daya lingkungan atau alam.

Ketahanan daerah memiliki keterkaitan erat dalam mendukung ketahanan nasional. Ketahanan daerah merupakan implementasi dari terwujudnya ketahanan nasional yang diukur melalui 8 gatra (bidang). Menurut Soedarsono (1997), ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik akan suatu kekuatan nyata dan efektif jika dibina secara bertahap melalui adanya ketahanan daerah, di mana ketahanan daerah di bina melalui ketahanan rumah tangga/keluarga dan pada akhirnya ketahanan keluarga akan bertumpu pada kekuatan unsumnya yaitu manusia yang harus memiliki ketahanan individu/pribadi.

Pada kaitannya dengan penanggulangan bencana, kemampuan suatu negara dalam meminimalisir risiko dari bencana menunjukkan ketangguhan negara dalam menghadapi bencana dan hal ini di mulai dari tingkatan daerah sehingga pada akhirnya mendukung ketahanan nasional. Skala besar negara, ketahanan sebuah negara terhadap bencana alam menurut Djalante et al. (2011) dipengaruhi oleh pemerintahan yang adaptif terhadap bencana dan memiliki 4 (empat) karakteristik kunci yang saling berkaitan, antara lain sistem polisentris dan *multilayered institution*, partisipasi dan kolaborasi, organisasi mandiri serta pembelajaran dan inovasi (*learning and innovation*). Keterkaitan antar 4 karakteristik kunci ini digambarkan dalam gambar 1. di bawah ini:



Gambar 1. Interlinkages between Key Characteristics of Adaptive Government in Relation to Building Resilience sumber: *Djalante et al., 2011*.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan merupakan data-data yang berasal dari data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan informan dari unsur pemerintah pusat, yakni dari Direktorat Jaminan Sosial sebagai pembina Tagana Pusat, dari unsur pemerintah daerah yakni dari dinas sosial sebagai pembina Tagana daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai penanggungjawab kegiatan penanggulangan bencana di daerah, dari unsur Tagana daerah yakni koordinator Tagana daerah, dan tokoh masyarakat yang mengetahui tentang Tagana. Keseluruhan berjumlah 9 (sembilan) informan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur buku, jurnal, laporan hasil penelitian, materi seminar, peraturan perundang-undangan yang didapat melalui bahan tercetak atau bahan yang bersifat elektronik yang mengkaji tentang penanggulangan bencana, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dan yang mengkaji tentang Taruna Siaga Bencana (Tagana). Unit analisis dalam penelitian

ini adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi.

Adapun alasan kedua daerah ini dipilih menjadi lokasi penelitian, yakni: 1) Status kedua daerah sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi sesuai data dari Indeks Rawan Bencana Indonesia (BNPB:2011). Dalam Indeks Rawan Bencana Indonesia, Kabupaten Sukabumi berada di peringkat 6 (enam) sedangkan Kabupaten Serang di peringkat 170 (seratus tujuh puluh) secara nasional; 2) Data bencana yang terjadi di Kabupaten Serang dan Sukabumi selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari Januari 2010 sampai dengan Maret 2015 yang cukup sering dan memiliki karakteristik berbeda. Kabupaten Serang memiliki data bencana banjir yang cukup sering dan Kabupaten Sukabumi yang memiliki data bencana longsor cukup signifikan; 3) Rasio Jumlah anggota Tagana kedua daerah yang tidak sebanding dengan luas wilayah, dimana Kabupaten Serang lebih banyak dibandingkan dengan anggota Tagana di Kabupaten Sukabumi, tetapi luas daerah kabupaten



Sukabumi lebih luas dari Kabupaten Serang; 4) Persebaran anggota Tagana Kabupaten Serang dibagi berdasarkan wilayah, yakni Timur, Barat, Selatan dan Utara sedangkan persebaran anggota Tagana Kabupaten Sukabumi secara umum terpenuhi untuk seluruh wilayah namun tidak merata jumlahnya karena lebih banyak pada satu kecamatan tertentu.

Data yang sudah didapatkan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan model analisis interaktif dari Mathew Milles dan Huberman (1992) dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sekilas Profil Tagana Kabupaten Serang

Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Serang mulai terbentuk melalui koordinasi antara Dinas Sosial Provinsi Banten dengan Dinas Sosial Kabupaten Serang. Dinas Sosial Kabupaten Serang sebagai pembina Tagana daerah mengumpulkan anggota masyarakat yang berminat dengan kegiatan sosial dan anggota masyarakat yang sudah sejak lama berkecimpung sebagai relawan ataupun penggiat kegiatan sosial khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Jumlah anggota Tagana Kabupaten Serang sampai saat ini berjumlah 164 orang yang tersebar di beberapa kecamatan.

Tabel 1. Data Penyebaran Tagana Kabupaten Serang

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Cinangka	6
2.	Anyer	2
3.	Ciomas	4
4.	Bojo Negara	11
5.	Pamarayan	9
6.	Bandung	2
7.	Cikande	5
8.	Tunjung Teja	13

9.	Kragilan	22
10.	Kopo	4
11.	Ciruas	15
12.	Binuang	3
13.	Carenang	12
14.	Kragilan	9
15.	Baros	4
16.	Petir	39
17.	Kibin	2
18.	Lebak Wangi	2
<b>Jumlah</b>		<b>164</b>

Sumber: Dinas Sosial Kab. Serang, 2014

### Sekilas Profil Tagana Kabupaten Sukabumi

Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat di bawah pembinaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang melalui Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Tagana Kabupaten Sukabumi sampai saat ini berjumlah 52 orang yang tersebar di beberapa daerah yang berada di Kabupaten Sukabumi.

Anggota Tagana Kabupaten Sukabumi memiliki latar belakang yang berbeda-beda namun memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga sesuai dengan jati diri Tagana yang merupakan relawan sosial yang berasal dari masyarakat dan sangat peduli pada kegiatan sosial khususnya tentang penanggulangan bencana.

Tabel 2. Data Penyebaran Tagana Kabupaten Sukabumi

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Palabuhan Ratu	24
2.	Cibadak	2
3.	Cikidang	5
4.	Nyalindung	2
5.	Kadudampit	1
6.	Cimanggu	2
7.	Kabandungan	2
8.	Kalapanunggal	2
9.	Cisaat	3

10. Gunung Guruh	1
11. Tegal Buleud	1
12. Pabuaran	1
13. Bojonggenteng	1
14. Curug Kembar	1
15. Sukalarang	1
16. Purabaya	1
17. Cicantayan	1
18. Sukaraja	1
19. Geger Bitung	1
<b>Jumlah</b>	<b>52</b>

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, 2015

### Peran Tagana Dalam Mitigasi Bencana

Tagana yang berasal dari unsur masyarakat memiliki peran yang sangat besar jika dioptimalkan secara baik dan Tagana dapat menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat lain untuk berperilaku yang tepat dalam menanggulangi bencana sehingga Tagana dapat juga dikatakan sebagai “*disaster front*” dalam penanggulangan bencana. Kerjasama dan hubungan antara Tagana dengan pemerintah akan menciptakan kolaborasi yang sangat penting terutama jika dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengurangan terhadap risiko dan dampak bencana atau yang sering disebut dengan mitigasi bencana. Pola mutualisme antara pemerintah memiliki program yang berkelanjutan dan sistemik dibantu oleh masyarakat melalui Tagana yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus terkait penanggulangan bencana.

Pada satu sisi, banyaknya sungai besar membuat daerah Kabupaten Serang subur namun pada sisi yang lain rawan bencana banjir jika terjadi curah hujan yang tinggi dan panjang. Keadaan di atas membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Serang memiliki persiapan untuk menanggulangi bencana banjir yang suatu saat dapat terjadi. Dinas Sosial Kabupaten Serang mempersiapkan peralatan terkait penanggulangan bencana agar suatu saat siap

untuk digunakan. Salah satu kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Serang, yakni dengan menginisiasi kegiatan mitigasi bencana. Biasanya kegiatan mitigasi bencana ini dilakukan bersama-sama dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan instansi lainnya dan dilaksanakan di kecamatan yang rawan bencana.

Kegiatan mitigasi yang dilakukan biasanya berbentuk penyuluhan, simulasi dan bakti sosial pada daerah-daerah yang rawan bencana serta daerah yang menjadi wilayah Kampung Siaga Bencana (KSB). Setiap kegiatan mitigasi yang dilakukan selalu melibatkan masyarakat dan anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana). Peralatan komunikasi yang sudah diberikan kepada koordinator Tagana pada beberapa kecamatan di Kabupaten Serang mempermudah komunikasi dan pengerahan anggota Tagana beserta unsur masyarakat lainnya. Tidak hanya Dinas Sosial Kabupaten Serang yang turut menginisiasi kegiatan mitigasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang sebagai koordinator kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Serang memiliki satu tugas pokok dan fungsi yakni mitigasi bencana sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana.

Pada sisi yang lain, BPBD Kabupaten Sukabumi sebagai organisasi yang memiliki tupoksi dalam penanggulangan bencana memiliki kegiatan yang termasuk kedalam tahapan mitigasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam. BPBD Kabupaten Sukabumi selalu melibatkan organ-organ yang tergabung di dalam sistem penanggulangan bencana, seperti dinas sosial, TNI-Polri, SAR Daerah, Pramuka, PMI dan juga masyarakat di setiap tahapan penanggulangan bencana. Pada tahapan mitigasi bencana ini unsur masyarakat seperti Tagana dilibatkan melalui rekomendasi dinas sosial. Hal ini selain

untuk menambah pengalaman dan kapasitas anggota Tagana, kegiatan mitigasi juga dapat menjadi landasan munculnya kekompakan dan kerjasama antar organ-organ yang berada di dalam sistem manajemen penanggulangan bencana.

Apa yang telah dilakukan Tagana dan pemerintah daerah di atas bila dikaitkan dengan mitigasi bencana, kegiatan yang sudah dilakukan sudah mencerminkan kegiatan mitigasi yang bersifat mitigasi nonfisik atau fungsional, seperti yang dijelaskan Carter (2008) bahwa salah satu kegiatan mitigasi dapat berbentuk mitigasi nonfisik atau fungsional (Nonstructure Mitigation) yang merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya dengan cara meningkatkan kemampuan baik fisik maupun teknik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tagana Kabupaten Serang juga bekerjasama dengan pihak sekolah melalui Gerakan Pramuka untuk memberikan penyuluhan terkait kebencanaan, pada kesempatan ini anggota Tagana sebagai narasumber. Selain itu BPBD Kabupaten Serang bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Tagana akan membuat buku tentang kebencanaan yang nantinya dapat diaplikasikan penggunaannya bagi siswa SD, SMP dan SMA.

Menurut keterangan eksplisit informan dari BPBD Kabupaten Sukabumi (Usman Susilo,

15 Mei 2015), “tidak jarang anggota Tagana menjadi instruktur atau narasumber dalam kegiatan mitigasi yang diinisiasi oleh BPBD karena pengalaman dan kemampuan anggota Tagana Kabupaten Sukabumi yang sudah diakui oleh BPBD. BPBD memberikan dukungan yang bersifat fasilitasi standar dalam kegiatan mitigasi seperti peralatan dan perlengkapan serta kendaraan bagi anggota Tagana yang ikut serta dalam kegiatan. Informan dari Tagana mengatakan bahwa kegiatan mitigasi yang telah dilakukan selalu bersama-sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem manajemen penanggulangan bencana seperti BPBD, TNI-Polri, SAR daerah dan melibatkan juga masyarakat. Bahkan kegiatan yang dilakukan tidak hanya pada masyarakat pada kawasan tertentu namun juga sering melakukan kegiatan mitigasi berupa simulasi dengan siswa sekolah” (YR, Tagana Kab. Sukabumi, 14 Mei 2015), hal ini penting sebagai proses mitigasi yang bersifat edukasi. Maka, dapat dikatakan kegiatan edukasi ini sangat penting sebagai salah satu cara atau media untuk menumbuhkan partisipasi sosial masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Berdasarkan pengamatan dan pengumpulan informasi di lapangan, dapat diketahui bagaimana peran Tagana dan pemerintah daerah khususnya pada tahapan mitigasi bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi dapat dipilah pada Tabel 3. di bawah ini:

Tabel 3. Karakteristik Pelaksanaan Mitigasi Bencana

No.	Indikator Karakteristik	Kabupaten Serang	Kabupaten Sukabumi
1.	Bentuk Mitigasi Bencana	Penyuluhan, simulasi dan bakti sosial untuk bencana banjir.	Kegiatan mitigasi yang sering dilakukan merupakan kegiatan mitigasi yang berkaitan dengan bencana longsor.

2.	Peran Pemda	Dinas Sosial Kabupaten Serang memiliki dana untuk menjalankan kegiatan mitigasi bencana sehingga berusaha mengoptimalkan dana yang ada dengan melibatkan instansi mitra lainnya serta masyarakat dan anggota Tagana untuk mensukseskan kegiatan mitigasi bencana.	Kegiatan mitigasi mutlak merupakan tugas pokok BPBD Kabupaten Sukabumi. Dinas Sosial merupakan instansi pendukung dan banyak berperan dalam fase tanggap darurat dan pascabencana.
3.	Peran Tagana	<p>a. Kehadiran Tagana membuat informasi mengenai bencana cepat tersampaikan dan masyarakat juga menjadi mengetahui tentang kebencanaan.</p> <p>b. Tagana menjadi media pembantu pemerintah daerah dalam menyampaikan program-program atau kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan bencana.</p>	<p>a. Anggota Tagana selain menjadi peserta kegiatan juga menjadi instruktur atau narasumber dalam kegiatan mitigasi yang diinisiasi oleh BPBD karena pengalaman dan kemampuan anggota Tagana Kabupaten Sukabumi yang sudah diakui.</p> <p>b. Tagana selalu koordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi lain serta wartawan dengan cara bertukar informasi terkait kebencanaan melalui alat komunikasi atau media sosial.</p>
4.	Partisipasi masyarakat dalam Tagana	<p>3. Anggota Tagana selalu siap untuk ikut berpartisipasi baik itu bersifat mitigasi struktural maupun mitigasi nonstruktural.</p> <p>4. Anggota Tagan ikut serta dalam kegiatan mitigasi bencana dengan cara penyuluhan dan simulasi bencana sebagai narasumber dan pendamping teknis di sekolah-sekolah</p>	<p>5. Anggota Tagana selalu ikut serta dalam kegiatan mitigasi melalui rekomendasi Dinas Sosial.</p> <p>6. Anggota Masyarakat sebagai penyambung komunikasi masyarakat di daerah rawan bencana dengan pemerintah daerah.</p>

### Koordinasi Tagana dengan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Pada sistem manajemen penanggulangan bencana, koordinasi sangat diperlukan karena seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, sistem manajemen penanggulangan bencana bekerja dengan banyak organisasi yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu koordinasi diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat tujuan

utama dari penanggulangan bencana yakni pengurangan dampak dari bencana. Selain organisasi yang kompleks, sumber daya manusia dan peralatan juga mutlak dimiliki dengan kuantitas yang banyak dan berkualitas sehingga dapat tercipta efektifitas.

Bagaimana koordinasi yang telah dilakukan oleh Tagana dan pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 4. di bawah ini:

Tabel 4. Kondisi Koordinasi Tagana dengan Pemerintah Daerah

Lokasi	Kondisi Terkait Koordinasi Tagana dengan Pemda
Kabupaten Serang	Koordinasi berjalan dengan baik. Setiap kegiatan penanggulangan bencana baik yang diinisiasi oleh BPBD maupun Dinas Sosial selalu mengikutsertakan lembaga-lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana. Tagana selalu diikutsertakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Tagana selalu hadir pada setiap kegiatan penanggulangan bencana. Tagana selalu mengkomunikasikan kejadian bencana yang terjadi dengan pihak-pihak terkait dan menyampaikan kebutuhan masyarakat pada saat bencana serta mendistribusikan bantuan bencana.



Wilayah Kabupaten Serang yang luas menjadi tantangan lebih bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk mampu melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dengan baik dan terstruktur. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi antar organ yang berada dalam sistem manajemen penanggulangan bencana termasuk juga pelibatan masyarakat. Kolaborasi dan koordinasi antara Tagana dengan komponen lainnya sudah berjalan dengan baik bahkan kolaborasi dan koordinasi yang baik itu memudahkan dalam penanggulangan bencana. Perlu adanya rapat-rapat koordinasi untuk memperbaharui informasi terkini terkait kesiapan dan ketersediaan personil, logistik dan peralatan dan juga informasi terkini terkait kebencanaan. Pelibatan dunia usaha untuk ikut dalam kegiatan penanggulangan bencana menjadi hal yang mutlak dilakukan karena dunia usaha memiliki tanggungjawab yang sama dalam kegiatan penanggulangan bencana. Tentu hal ini diperlukan komitmen khusus antara pihak dunia usaha dengan pemerintah daerah terkait kegiatan penanggulangan bencana ini.

Dinas Sosial Kabupaten Serang memiliki dana untuk menjalankan kegiatan mitigasi bencana sehingga berusaha mengoptimalkan dana yang ada dengan melibatkan instansi mitra lainnya serta masyarakat dan anggota Tagana untuk mensukseskan kegiatan mitigasi bencana. Pelibatan anggota Tagana dalam kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Serang melalui dinas sosial menunjukkan koordinasi dan saling menghormati antar instansi penanggulangan bencana. Bagaimanapun Tagana merupakan tanggung jawab dinas sosial sebagai pembina

teknis di daerah. Kadangkala, permasalahan koordinasi dipicu oleh hal-hal yang tidak terlalu substansi seperti permintaan ijin pelibatan personil, surat-menyurat dan lain sebagainya.

Seperti yang disampaikan oleh informan dari BPBD Kabupaten Serang (ADQ, BPBD Kab. Serang, 16 April 2015): “setiap kegiatan selalu koordinasi dan kerjasama dengan tagana melalui dinsos, setiap terjadi bencana selalu dilibatkan, tagana selalu hadir dalam setiap bencana di kabupaten Serang. Setiap kegiatan mitigasi fungsional seperti sosialisasi atau pelatihan selalu mengundang tagana”. Tagana Kabupaten Serang juga menginformasikan bahwa koordinasi antar aktor penanggulangan bencana sudah terjalin baik, seperti yang disampaikan oleh ASR (Tagana Kab. Serang, 16 April 2015): “sering komunikasi terkait kegiatan penanggulangan bencana, baik dengan dinas, BPBD maupun dengan TNI dan Polisi”. Amsar juga mengatakan: “pada kegiatan prabencana sering dilakukan bakti sosial pembersihan bendungan pamarayan dan pembersihan kali ciujung. Penyuluhan mengenai kebencanaan dengan berkoordinasi dengan masyarakat, kelurahan, kecamatan, dinas sosial dan instansi terkait lainnya. Saat bencana: melakukan pelaporan terkait bencana yg terjadi kepada koordinator dan atau pembina tagana di kabupaten, kemudian memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk siap-siap mengungsi ke tempat yang lebih aman jika akan terjadi banjir. Koordinasi dengan Dinsos terkait lokasi untuk tempat evakuasi, tempat logistik, dapur umum. Membantu mempersiapkan logistik di lapangan. Pasca bencana: membantu distribusi logistik kepada masyarakat, advokasi

kebutuhan masyarakat yang menjadi pengungsi dalam bencana. Trauma healing yang dilakukan anggota Tagana yang perempuan”. Keterangan di atas menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan antar aktor penanggulangan bencana beserta Tagana di Kabupaten Serang sudah terjalin dengan baik.

Wilayah Kabupaten Sukabumi yang lebih luas daripada Kabupaten Serang memerlukan perhatian yang intensif. Hal ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan personil dan kualitas personil. “Ketersediaan dan kualitas personil Tagana yang belum terpenuhi seutuhnya” (YR, Tagana Kab. Sukabumi, 14 Mei 2015). BPBD Kabupaten Sukabumi sebagai koordinator dalam kegiatan penanggulangan bencana memiliki peran yang cukup sentral dan berpengaruh. BPBD memiliki peran sentral namun BPBD tetap memerlukan instansi lain untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh BPBD begitu juga sebaliknya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sistem polisentris yang terdapat banyak organisasi dalam sistem manajemen penanggulangan bencana.

Menurut NJ (Dinas Sosial Kab. Sukabumi, 15 Mei 2015), “koordinasi sangat terjalin dengan baik, sering komunikasi antar instansi terkait seperti BPBD, SAR, TNI dan melibatkan tagana tentunya. Sering ada Rapat koordinasi yang dilakukan oleh BPBD dengan instansi terkait selain jika terjadi bencana. Koordinasi terkait kegiatan mitigasi pernah dilakukan bersama-sama dengan instansi lainnya ketika di daerah Cisaat ada pergerakan tanah yang dilaporkan tagana dan instansi penanggulangan bencana mengambil langkah bersama-sama untuk mengevakuasi masyarakat”. YR (Tagana Kab. Sukabumi, 14 Mei 2014) juga mengatakan “Tagana selalu koordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi lain serta wartawan dengan cara bertukar informasi terkait kebencanaan melalui alat komunikasi atau media sosial”.

Keterangan-keterangan di atas menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan antar aktor penanggulangan bencana beserta Tagana di Kabupaten Sukabumi sudah terjalin dengan baik bahkan koordinasi juga terjalin dengan media massa melalui wartawan.

Review Djalante et al. (2011) menunjukkan bahwa lembaga polisentris dan berlapis-lapis memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mempengaruhi kapasitas dalam mengelola ketahanan terhadap bencana. Berjalannya sistem manajemen bencana dapat secara baik berjalan melalui sistem pemerintahan yang polisentris seperti yang dikemukakan oleh McGinnis (Djalante et al., 2011).

Kerjasama dan koordinasi juga dilakukan dengan pihak dunia usaha namun kerjasama yang dilakukan masih pada tahap tanggap darurat dengan memberikan bantuan logistik bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan penerjunan relawan-relawan dari dunia usaha. Koordinasi dan kerjasama pada kegiatan penanggulangan bencana yang sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Sukabumi tercermin dalam proses tanggap darurat dan pascabencana longsor yang terjadi pada akhir Maret 2015 di Desa Cimerak Kecamatan Cireunghas yang dilakukan dengan waktu singkat, dimulai dari evakuasi masyarakat dan korban sampai dengan pascabencana, dimana masyarakat akan ditempatkan pada daerah yang aman dengan dana yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Setiap kegiatan penanggulangan bencana yang melibatkan Tagana, anggota Tagana selalu hadir untuk membantu terlaksananya kegiatan dengan baik dan lancar, bahkan beberapa anggota Tagana sering diamanatkan untuk menjadi instruktur pada pelatihan yang diselenggarakan oleh BPBD (US, BPBD Kab. Sukabumi, 15 Mei 2015). Informasi mengenai kebencanaan

tidak hanya berasal dari masyarakat saja namun juga dapat melalui wartawan atau media massa. Hal ini menjadi simbiosis mutualisme sehingga Forum Tagana Kabupaten Sukabumi tetap menjalin komunikasi dengan wartawan karena tidak semua masyarakat ataupun Tagana mampu secara luas menyebarkan informasi.

Oleh karena itu, penting bagi komponen-komponen seperti komunikasi, sistem peringatan dan fasilitas yang ada di dalamnya harus berfungsi secara efisien pada tingkat tertinggi dan harus dijaga sejauh mungkin dari efek bencana. Hal ini juga penting bahwa pemerintah harus mengatur organisasi non-pemerintah untuk memperluas peran pada penanggulangan bencana sehingga mereka dapat mengatasi gangguan tambahan, dan tekanan yang terdapat di dalamnya.

### **Manfaat Partisipasi Tagana Bagi Ketahanan Daerah**

Kehadiran Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Kabupaten Serang sangat bermanfaat bagi masyarakat, dengan kehadiran Tagana

membuat informasi mengenai bencana cepat tersampaikan dan masyarakat juga menjadi mengetahui tentang kebencanaan. NK, salah satu tokoh pemuda Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang, mengatakan bahwa “adanya Tagana sangat membantu masyarakat, tagana membantu informasi terkait kebencanaan. Masyarakat menjadi memahami tentang kebencanaan sehingga dapat mengurangi jatuhnya korban dan mengurangi kerugian”. (21 April 2015)

Bagi Pemerintah Kabupaten Serang, kehadiran Tagana menjadi media pembantu pemerintah daerah dalam menyampaikan program-program atau kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan bencana sehingga yang paling utama masyarakat menjadi mengetahui bagaimana cara yang dilakukan untuk meminimalisir dampak dari bencana alam.

Manfaat partisipasi Tagana terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 5. di bawah ini:

Tabel 5. Kondisi Manfaat Partisipasi Tagana

<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi Terkait Koordinasi Tagana dengan Pemda</b>
Kabupaten Serang	Bagi Pemerintah Kabupaten Serang, Kehadiran Tagana menjadi media pembantu pemerintah daerah dalam menyampaikan program-program atau kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan bencana. Tagana membantu informasi terkait Kebencanaan. Bagi masyarakat, tagana sangat membantu masyarakat, masyarakat menjadi memahami tentang kebencanaan sehingga dapat mengurangi jatuhnya korban dan mengurangi kerugian.
Kabupaten Sukabumi	Bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Tagana sering memberikan info tentang kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan bencana kepada instansi terkait dengan maksud untuk menjadi kewaspadaan. Bagi masyarakat, Tagana menambah pengetahuan masyarakat tentang bencana dan menjadi penyambung informasi masyarakat kepada pemerintah

Partisipasi dan kolaborasi masyarakat diperlukan dalam manajemen penanggulangan bencana. Partisipasi dan kolaborasi masyarakat ini dipengaruhi oleh kepemimpinan baik dalam masyarakat dan pemerintahan, faktor kepercayaan dan adanya modal sosial/social

capital. Modal sosial menurut Sharma dan Patt (Djalante et al., 2011) merupakan norma dan hubungan sosial dalam struktur sosial masyarakat yang memungkinkan adanya koordinasi dan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan juga telah diidentifikasi

sebagai elemen penting untuk membantu masyarakat menjadi lebih kuat menghadapi bencana. Tagana sebagai salah satu aktor dalam struktur sosial masyarakat harus mampu menjadi bagian dari modal sosial yakni sebagai penjaga hubungan sosial masyarakat dan juga pemerintah daerah khususnya terkait dengan penanggulangan bencana.

Jumlah anggota Tagana yang ada di Kabupaten Sukabumi lebih sedikit jumlahnya dari Kabupaten Serang dan persebaran anggota Tagana di Kabupaten Sukabumi tidak sepenuhnya terwakili di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi karena ada penumpukan anggota Tagana pada satu kecamatan tertentu (YR, Tagana Kab. Sukabumi, 14 Mei 2015). Namun hal ini tidak mempersurut partisipasi Tagana dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sukabumi khususnya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam. Selain itu, NJ (Dinas Sosial Kab. Sukabumi, 15 Mei 2015) mengatakan “anggota Tagana sering memberikan info tentang kegiatan pertambangan yang berpotensi bencana kepada Dinsos dan instansi terkait agar menjadi kewaspadaan”.

Upaya yang dilakukan Tagana di atas, menunjukkan bahwa Tagana bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pihak terkait atas kerawanan suatu daerah akan bencana. Carter (2008) menegaskan bahwa komunitas masyarakat tertentu dapat mempengaruhi beberapa komunitas di satu waktu yang sama dan komunitas ini disebut “*disaster front*”. Oleh karena itu, setiap organisasi penanggulangan bencana harus memenuhi partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang sesuai. Pemberian informasi kepada pihak terkait dan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi

masyarakat ini juga dapat didorong dengan adanya sosialisasi penilaian terhadap bencana dengan menggunakan kearifan lokal sehingga pengetahuan yang diberikan ke masyarakat tidak hanya bersifat teori dan praktek formal masa sekarang namun juga teori dan praktek yang sudah berjalan dari sejak dahulu. Kearifan lokal merupakan bagian dari norma sosial masyarakat dan ini menjadi bagian dari modal sosial masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

Manfaat Tagana terhadap ketahanan daerah dapat jabarkan sebagai berikut, salah satu indikator dari ketahanan daerah adalah masyarakat yang memiliki kemandirian dan inisiatif dalam menghadapi bencana alam. Seperti yang disampaikan salah satu anggota masyarakat Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi, TN (16 Mei 2015), “Tagana bagus, masyarakat menjadi tahu tentang bencana, jika terjadi bencana harus tahu berbuat apa dan harus menghubungi siapa”.

Kemandirian dan inisiatif masyarakat tentunya diperoleh melalui pelatihan, penyuluhan dan simulasi dalam menghadapi bencana alam secara berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan Djalante et al. (2011) bahwa faktor partisipasi masyarakat dan kolaborasi masyarakat dengan pemerintah merupakan salah satu faktor dalam mendukung ketahanan suatu bangsa. Oleh karena itu selain partisipasi masyarakat (Tagana) diperlukan juga persiapan anggaran oleh pemerintah untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi risiko dan dampak dari bencana alam.

Ketahanan suatu daerah terhadap bencana alam dapat dilihat melalui indikator adanya sistem manajemen penanggulangan daerah, partisipasi masyarakat dan LSM, dan adanya inovasi dan transfer pengetahuan tentang bencana. Jadi, Pengetahuan masyarakat



atas kegiatan penanggulangan bencana dan partisipasi dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana khususnya pada fase prabencana seperti kegiatan mitigasi menjadi indikator yang diharapkan berjalan sehingga dapat mendukung ketahanan daerah.

## KESIMPULAN

Peran Tagana dalam kegiatan mitigasi bencana sangat signifikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada Kabupaten Serang kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan dinas sosial merupakan inisiasi dari anggota Tagana di lapangan, meskipun memiliki dana yang kecil namun kegiatan mampu dilaksanakan dan melibatkan instansi lain. Pada Kabupaten Sukabumi, kegiatan mitigasi mutlak merupakan tugas BPBD Kabupaten Sukabumi. Dinas sosial merupakan instansi pendukung dan banyak berperan dalam fase tanggap darurat dan pascabencana. Namun, BPBD tetap melibatkan dinas sosial dan Tagana dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana tidak terkecuali mitigasi bencana.

Pada umumnya, terkait koordinasi penanggulangan bencana pada kedua daerah sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Hal ini dibuktikan dengan sering dilakukan rapat koordinasi baik pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Sering melibatkan instansi lain pada saat kegiatan penanggulangan bencana terutama pada kegiatan mitigasi bencana sehingga dapat memupuk kekompakan dan menjalin komunikasi secara optimal dan hal ini terindikasi juga dengan cepatnya pemberlakuan tanggap darurat dan pascabencana.

Masyarakat mengetahui tentang kebencanaan, yakni mulai dari penilaian terhadap bahaya, informasi bencana bahkan sistem manajemen penanggulangan bencana pada level komunitas masyarakat. Masyarakat sebagai "*disaster front*" memiliki peran sentral

dalam sistem manajemen penanggulangan bencana karena tidak mungkin pemerintah mampu memenuhi kesiapan sumberdaya dalam kegiatan penanggulangan bencana. Pada masa saat ini, masyarakat sudah mampu melakukan kegiatan minimal pada tahap prabencana yakni, mitigasi dan kesiapsiagaan. Keseluruhan kemampuan itu tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan mitigasi yang dilakukan Tagana bersama pemerintah daerah. Kedua hal, mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi menjadi dampak langsung peran masyarakat melalui Tagana dalam mendukung ketahanan daerah terhadap bencana alam.

## SARAN

Partisipasi Masyarakat melalui Tagana harus ditingkatkan dengan kemampuan yang tidak hanya berkisar pada saat tanggap darurat dan pascabencana namun juga pada tahap prabencana. Melalui ketersediaan dana yang memadai dapat meningkatkan program-program untuk melatih anggota Tagana dan masyarakat agar dapat mengurangi dampak bencana alam. Permasalahan ketersediaan dana, pemerintah dapat menggandeng lembaga-lembaga filantropi yang memiliki dana dan program untuk mitigasi bencana.

Koordinasi merupakan unsur yang sangat mendukung dalam manajemen penanggulangan bencana. Oleh karena itu perlu sosialisasi dan latihan bersama secara terus menerus dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana untuk menjaga terjalannya koordinasi antar aktor penanggulangan bencana. Tidak hanya pemerintah, TNI/Polri dan pihak swasta bahkan komunitas masyarakat harus dapat menginisiasi kegiatan penanggulangan bencana khususnya mitigasi bencana dan harus menjadikan salah satu program penting dalam hubungannya dengan manajemen penanggulangan bencana. Perlu ada jobdesk yang jelas antara lembaga-

lembaga dalam manajemen penanggulangan bencana. Terlebih yang terkait dengan kegiatan mitigasi struktural, dengan geliat pembangunan saat ini perlu mengutamakan unsur manajemen bencana. Oleh karena itu, pemimpin daerah dapat menggunakan pengaruhnya dalam usaha ini dengan melakukan perencanaan pembangunan yang berdasarkan pengurangan risiko bencana. Pemimpin daerah dapat melakukan koordinasi lintas sektoral terkait dengan hal ini dan bisa menunjuk lembaga tertentu yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas lembaga itu dalam manajemen penanggulangan bencana. Misalnya untuk pembangunan gedung yang berada dekat dengan jalur hijau atau dekat dengan daerah yang rawan terjadi bencana, pemimpin daerah dapat meminta pendapat lembaga-lembaga yang bisa menilai model gedung yang tepat dibangun di daerah itu. Bisa juga pemerintah membuat pemetaan wilayah yang rawan akan terjadinya bencana.

Konsistensi dan partisipasi masyarakat melalui Tagana harus terus terjaga dengan mengikutsertakan Tagana dalam berbagai tahapan penanggulangan bencana terutama pada proses mitigasi bencana. Hal ini penting, mengingat Tagana merupakan salah satu elemen masyarakat yang berperan dalam penanggulangan bencana yang diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus mampu menyiapkan program untuk dapat meningkatkan peran Tagana dalam tahapan penanggulangan bencana sehingga menjadi poin penting menjaga ketahanan daerah khususnya dalam manajemen penanggulangan bencana. Tidak tertutup kemungkinan ada kerjasama “segitiga” antara pemerintah daerah, lembaga filantropi dan Tagana untuk membangun peran masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Margaretha Hanita, Drs. Gunawan yang memberikan tanggapan dan masukan dalam proses penelitian ini. Kepada narasumber-narasumber yang telah bersedia memberikan informasi serta Prof. Carunia M. Firdausy (Profesor Riset LIPI) atas masukan dan tanggapan terhadap artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- APEC. (2009). *Strategy for Disaster Risk Reduction and Emergency Preparedness and Response in the Asia Pacific region : 2009 to 2015*. Lima: APEC.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. (2011). *Indeks Rawan Bencana Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, BNPB RI.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. (2015). *Kerangka Kerja Sendai. Kerangka Kerja Sendai (2015-2030) Untuk Pengurangan Risiko Bencana*. Jakarta: BNPB RI.
- Carter, W. N. (2008). *Disaster Management: “A Disaster Managers Handbook*. Manila: Asian Development Bank.
- Departemen Sosial RI. (2006). *Taruna Siaga Bencana (Youth Disaster Preparedness Unit), sebagai Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas*, Jakarta: Depsos RI.
- Djalante, R., Holley, C., & Thomalla, F. (2011). Adaptive governance and managing resilience to natural hazards. *International Journal of Disaster Risk Science*, 2(4), 1–14. <http://doi.org/10.1007/s13753-011-0015-6>

- Enditya, R. (2013). Peran Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dalam Kesiapsiagaan Bencana Di DKI Jakarta (Studi Kasus Terhadap Taruna Siaga Bencana Jakarta Barat). Universitas Indonesia.
- Fernandez, G., & Shaw, R. (2013). Youth Council participation in disaster risk reduction in Infanta and Makati, Philippines: A policy review. *International Journal of Disaster Risk Science*, 4(3), 126–136. <http://doi.org/10.1007/s13753-013-0014-x>
- Gunawan, Sugianto, A. D. A. (2009). Peran Tagana Dalam Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Untuk Mengurangi Resiko Bencana Alam. Jakarta: P3KS Press.
- Lassa, J., Pujiono, P., Pristiyanto, D., Paripurno, E. T., Magatani, A., & Purwati, H. (2009). Pengelolaan Resiko bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Menteri Sosial RI. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Tagana).
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009.
- Sari, D.P. (2014). Analisis Peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanggulangan Bencana di Kota Bengkulu, Universitas Bengkulu.
- Soedarsono, S. (1997). Ketahanan Pribadi & Ketahanan Keluarga Sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional (Cet. 2.). Jakarta: Intermedia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.